

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPTIF DI LINGKUNGAN KAMPUS

Chinse Alqamar S.F

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Email: chinse39@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is one of the biggest problems facing Indonesia, permeating various sectors, including education. In the campus environment, corruption is not only limited to financial acts, but also includes unethical behaviors such as plagiarism and bribery for graduation, indicating the need for effective anti-corruption education to shape a generation with integrity and social responsibility. This research aims to explore how anti-corruption education can be effectively implemented in preventing and reducing corruptive behavior in the campus environment, with a main focus on internalizing integrity and ethical values among students. The method used in this research is a literature study and qualitative analysis of an overview of the implementation of anti-corruption education in Indonesian universities, as well as interviews with educators to get their perspective on the effectiveness of existing programs. The results show that many of the existing anti-corruption education programs are still ceremonial and do not touch the deep aspects of integrity behavior, and anti-corruption education has not been systematically integrated in the higher education curriculum, so the implementation is still limited and less than optimal. If not addressed, corruptive behavior among students can continue into the workforce, worsening the culture of corruption in society.

Keywords: *Anti-Corruption Education; Corruptive Behavior; Integrity; Ethics; Campus.*

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, meresap ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Di lingkungan kampus, korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan finansial, tetapi juga mencakup perilaku tidak etis seperti plagiarisme dan suap untuk kelulusan, yang menunjukkan perlunya pendidikan anti korupsi yang efektif untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara efektif dalam mencegah dan mengurangi perilaku koruptif di lingkungan kampus, dengan fokus utama pada internalisasi nilai-nilai integritas

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dan etika di kalangan mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap gambaran umum terkait implementasi pendidikan anti korupsi di universitas di Indonesia, serta wawancara dengan tenaga pendidik untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai efektivitas program yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak program pendidikan anti korupsi yang ada saat ini masih bersifat seremonial dan tidak menyentuh aspek mendalam tentang perilaku integritas, serta pendidikan anti korupsi belum secara sistematis diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi, sehingga pelaksanaannya masih terbatas dan kurang optimal. Jika tidak ditangani, perilaku koruptif di kalangan mahasiswa dapat berlanjut hingga ke dunia kerja, memperburuk budaya korupsi di masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi; Perilaku Koruptif; Integritas; Etika; Kampus.

I. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini, merasuk ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Di lingkungan kampus, korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan finansial yang mencuri uang negara, tetapi juga meliputi perilaku-perilaku tidak etis seperti plagiarisme, nepotisme, suap untuk kelulusan, dan manipulasi dalam penerimaan mahasiswa. Fenomena ini sangat memprihatinkan, mengingat kampus seharusnya menjadi wadah untuk membentuk generasi yang bermoral, berintegritas, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Pendidikan anti korupsi di kampus menjadi semakin relevan dan mendesak dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk menolak dan melawan segala bentuk perilaku koruptif.

Tujuan dari pendidikan anti korupsi di kampus adalah untuk menciptakan kesadaran akan bahaya korupsi, sekaligus membangun karakter mahasiswa yang integritasnya tinggi. Dalam konteks ini, korupsi di lingkungan kampus sering kali tidak dianggap sebagai masalah serius, baik oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Perilaku-perilaku kecil yang tidak sesuai dengan prinsip etika akademik sering dianggap wajar dan menjadi budaya yang merugikan dalam jangka panjang. Misalnya, tindakan kecurangan saat ujian atau tugas akademik sering kali dianggap hal sepele, padahal hal tersebut mencerminkan akar dari perilaku koruptif yang lebih besar. Kampus sebagai salah satu institusi yang membentuk intelektual masa depan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesadaran ini.

Permasalahan utama yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana upaya pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara efektif dalam mencegah dan mengurangi perilaku koruptif di lingkungan kampus. Pendidikan anti korupsi harus lebih dari sekadar transfer pengetahuan; perlu ada penekanan pada internalisasi nilai-nilai integritas dan etika yang kuat. Kampus sebagai lingkungan yang mencetak pemimpin masa depan perlu menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Namun, hingga saat ini, pendidikan anti korupsi belum

secara sistematis diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, atau jika pun ada, pelaksanaannya masih terbatas dan kurang optimal.

Perilaku koruptif di kampus memiliki dampak yang jauh lebih luas dari yang tampak di permukaan. Jika tindakan korupsi di kalangan mahasiswa dibiarkan, mereka dapat tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang juga korup di masa depan. Penelitian telah menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur yang ditunjukkan di lingkungan pendidikan cenderung dibawa hingga ke dunia kerja dan kehidupan sosial, yang pada akhirnya akan memperburuk budaya korupsi di masyarakat. Dengan demikian, korupsi di kampus bukan hanya masalah lokal di lingkungan pendidikan, tetapi juga ancaman bagi masa depan bangsa.

Selain itu, mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, dan jika dibekali dengan pengetahuan serta moralitas yang baik, mereka dapat menjadi penggerak dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Tanpa pendidikan anti korupsi yang memadai, kampus bisa menjadi tempat berkembangnya bibit-bibit koruptor masa depan. Oleh karena itu, membahas bagaimana pendidikan anti korupsi dapat mencegah perilaku koruptif di lingkungan kampus menjadi hal yang sangat penting. Ini tidak hanya untuk mengatasi permasalahan sekarang, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi masa depan memiliki integritas dan moral yang kuat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pendidikan anti korupsi di berbagai institusi pendidikan. Sebagai contoh, penelitian oleh (Musyarofah, 2024) mengkaji implementasi pendidikan anti korupsi di beberapa universitas di Indonesia dan menemukan bahwa sebagian besar program yang ada masih bersifat seremonial dan tidak menyentuh aspek-aspek mendalam tentang perilaku integritas. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2015) menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan anti korupsi di kampus tergantung pada sejauh mana materi pendidikan tersebut disampaikan dalam konteks kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Di sisi lain, penelitian oleh (Kristono, 2018) menggarisbawahi pentingnya metode pengajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman dalam pendidikan anti korupsi. Takaendengan menemukan bahwa metode ceramah tradisional tidak cukup efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. Penggunaan simulasi, diskusi kasus, dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan anti korupsi terbukti lebih efektif dalam memengaruhi perilaku mahasiswa.

Penelitian ini berbeda dari karya sebelumnya karena fokus utamanya adalah pada pengembangan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis dalam pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada evaluasi program yang ada, penelitian ini akan mengusulkan solusi dan model pendidikan anti korupsi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di kampus. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada metode pendidikan di kelas, tetapi juga melibatkan integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kampus secara keseluruhan. Dalam hal ini, penelitian ini menekankan pentingnya peran semua pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi dalam menciptakan budaya anti korupsi di kampus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan anti korupsi perlu diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan kampus. Program-program pendidikan anti korupsi harus

mencakup kegiatan-kegiatan praktis yang dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas, seperti simulasi kasus, pelatihan etika, serta diskusi kelompok mengenai kasus korupsi yang nyata. Selain itu, penting bagi kampus untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal administrasi, sehingga dapat menjadi contoh nyata dari penerapan nilai-nilai anti korupsi.

Selain pendidikan formal, pendekatan informal seperti pembentukan kelompok-kelompok mahasiswa anti korupsi, penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan diskusi terbuka juga sangat penting. Mahasiswa perlu didorong untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ini, sehingga mereka dapat merasa memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya model pendidikan anti korupsi yang efektif dan aplikatif di lingkungan kampus. Dengan model ini, diharapkan mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas dan etika, sehingga perilaku koruptif dapat dicegah sejak dini. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan tinggi tentang cara yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, serta menciptakan budaya kampus yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya nasional memberantas korupsi dengan melibatkan peran aktif institusi pendidikan dan mahasiswa sebagai agen perubahan.

II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan anti korupsi secara efektif di kampus untuk mencegah perilaku koruptif?
- 2) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari civitas akademika, termasuk peran dosen, staf administrasi, dan manajemen kampus?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur serta metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Metode kualitatif dipilih karena fokus pada analisis naratif dan pemahaman pengalaman, persepsi, serta interaksi para pelaku di kampus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana civitas akademika, termasuk dosen, staf administrasi, dan mahasiswa, memahami serta menerapkan nilai-nilai anti korupsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informasi kunci, yaitu dosen Fakultas Hukum yang memiliki peran penting dalam mengajarkan mata kuliah yang berhubungan dengan hukum dan etika. Wawancara bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi, tantangan yang dihadapi, serta saran mereka untuk perbaikan sistem pengajaran di kampus. Dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data primer yang kaya tentang sudut pandang akademisi terhadap integrasi nilai-nilai integritas dalam kurikulum yang ada.

Selain wawancara, observasi juga dilakukan untuk memantau secara langsung kegiatan-kegiatan di kampus terkait upaya pemberantasan korupsi, seperti seminar, diskusi kelompok,

dan kegiatan informal yang diinisiasi oleh mahasiswa. Observasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang partisipasi mahasiswa dalam kegiatan anti korupsi serta pengaruh pendidikan formal dan non-formal terhadap perilaku mereka sehari-hari.

Data yang terkumpul dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik hal ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan pendidikan anti korupsi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan model pendidikan anti korupsi yang efektif dan berguna serta memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam program mereka.

IV. PEMBAHASAN

A. Masalah Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek, terutama dalam birokrasi dan politik. Korupsi di Indonesia bukan fenomena baru; praktik ini telah berlangsung lama dan diwariskan dari sistem kolonial yang menciptakan pola pemerintahan yang sentralistik dan tertutup. Dalam konteks sejarah, birokrasi kolonial Hindia Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang cenderung eksploitatif, sehingga budaya korupsi berkembang sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dan sumber daya.

Pada dasarnya, korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan dengan tujuan untuk memperoleh faktor ekonomi yang ditunjukkan dengan keuntungan.¹ Indonesia dapat dilihat sebagai negara yang menghadapi masalah korupsi yang kompleks, dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial. Budaya patronase atau loyalitas kepada keluarga dan kerabat sering kali lebih diutamakan daripada loyalitas kepada negara. Ini menciptakan situasi di mana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi hal yang lazim. Dalam struktur sosial yang masih kental dengan nilai-nilai feodal, posisi dalam pemerintahan sering digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan kelompok, yang pada akhirnya menimbulkan korupsi dalam berbagai bentuk, seperti nepotisme dan kolusi.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan juga turut menyumbang terhadap maraknya korupsi di Indonesia. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan adanya tekanan ekonomi, mendorong individu atau kelompok untuk mencari jalan pintas dalam meraih keuntungan, bahkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Sistem pemerintahan yang masih sering tertutup dan minimnya transparansi memperparah kondisi ini, sehingga ruang untuk korupsi tetap terbuka lebar.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan yang jelas untuk menangani tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbagai bentuk perbuatan korupsi telah diatur dan dianggap melanggar hukum, seperti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, dan pemerasan. Namun,

¹ I Komang Sri Cahyadi. 2022. *Pendidikan anti korupsi sebagai strategi dalam pengembangan budaya anti korupsi pada generasi muda di Indonesia*. Civic Education Journal. Vol. 4. No. 2. Hlm. 260.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dimana hukum dijadikan suatu pegangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam penanganan kasus korupsi ini tentu tidak sedikit terdapat banyak halangan ataupun ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan penegakan yang terjadi pada banyak kasus yang kerap kali terjadi di Negara Indonesia ini.² Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi.

Praktik-praktik seperti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, dan pemerasan menjadi hal yang lumrah dalam birokrasi Indonesia. Perbuatan tersebut, meskipun dilarang oleh undang-undang, masih terus terjadi, terutama di level pemerintahan pusat dan daerah yang memiliki akses langsung terhadap sumber daya negara. Hal ini membuktikan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang sulit dipisahkan.

Dalam situasi ini, Indonesia membutuhkan reformasi budaya dan struktural serta penegakan hukum yang lebih kuat untuk memerangi korupsi. Pendidikan anti-korupsi di berbagai jenjang pendidikan merupakan salah satu cara penting untuk mencegah korupsi dan mendidik generasi berikutnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah harus ditingkatkan, dan masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam mengawasi pemerintahan.

Pada akhirnya, solusi parsial tidak dapat mengatasi korupsi Indonesia. Diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai bagian masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga orang-orang di luar pemerintahan. Korupsi akan tetap menjadi ancaman bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa jika tidak ada kesadaran kolektif dan tindakan konkret untuk melakukan reformasi.

B. Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi dalam Mencegah Perilaku Koruptif

Pendidikan anti-korupsi merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan peraturan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral yang kuat dalam melawan segala bentuk korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Intan Nurina Seftinira, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, bahwa *"pendidikan anti-korupsi penting diterapkan di kampus karena mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja berpotensi menjadi pemimpin atau profesional yang berpengaruh. Tanpa pendidikan yang kuat mengenai korupsi, mahasiswa berisiko tergoда oleh lingkungan kerja yang koruptif dan bisa terjebak dalam praktik yang melanggar hukum."* Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1, Perlu diketahui bahwa hal yang termasuk tindak pidana korupsi sendiri mencakup beberapa unsur yakni perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter suatu bangsa.³ Mahasiswa diajarkan untuk mengenal dan

² Fernando Tobing. 2022. *Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol. 2. No. 4. Hlm. 149.

³ Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari. 2024. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. Journal of Accounting Law Communication and Technology. Vol. 1. No. 2. Hlm. 308.

memahami prinsip integritas dan etika melalui pendidikan. Pendidikan anti-korupsi yang diberikan sejak dini memiliki potensi besar untuk membentuk sikap dan watak seseorang sehingga mereka tidak melakukan korupsi.

Pendidikan anti-korupsi harus diterapkan secara konsisten di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, dan juga dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan bahwa pendidikan ini akan membangun budaya antikorupsi yang kuat di masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab strategis untuk mencegah korupsi sebagai generasi penerus. Setelah dididik, mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu membangun sistem yang lebih terbuka, jujur, dan berintegritas.

Selain itu, pendidikan anti-korupsi perlu mencakup pemahaman tentang berbagai modus korupsi yang terjadi di dunia nyata. Hal ini penting agar mahasiswa dapat mengenali indikasi korupsi sejak awal dan tidak mudah terjerumus dalam praktik korupsi. Ibu Intan menekankan bahwa "mahasiswa perlu dibekali pengetahuan tentang berbagai bentuk dan cara-cara korupsi, sehingga mereka bisa lebih kritis dan waspada dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi, baik dalam dunia akademis maupun profesional."

Pendidikan anti-korupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap, dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi.⁴ Dengan demikian, pendidikan ini menjadi alat yang efektif untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain pendidikan formal di kelas, metode non-formal seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, serta seminar juga memiliki peran penting. Kegiatan-kegiatan ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan memahami kompleksitas korupsi dalam berbagai konteks. Menurut Ibu Intan, "*pendidikan formal saja tidak cukup, yang paling mendasar dan nomor satu adalah kesadaran diri atau iman.*" Faktor moral dan spiritual menjadi pengendali dari dalam yang mencegah individu melakukan tindakan korupsi, sehingga pendidikan anti-korupsi harus dilengkapi dengan pembinaan karakter secara menyeluruh.

C. Cara Mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi Secara Efektif Di Kampus

Agar gerakan pencegahan korupsi lebih efektif, Pendidikan anti-korupsi perlu secara struktural direalisasi dan menjadi salah satu syarat yang perlu dialami oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.⁵ Pendidikan anti-korupsi tidak dimaksudkan untuk memberantas korupsi, tetapi untuk mencegahnya dengan mengajarkan orang untuk berperilaku anti-korupsi. Dengan demikian, gerakan ini dapat membentuk sikap anti-korupsi pada kaum muda dan membuat mereka lebih bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai situasi yang rentan terhadap korupsi.

⁴ Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, Arya Dwi Yuda. 2024. *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2. No. 2. Hlm. 248.

⁵ Yusrianto Kadir. 2018. *Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi*. Gorontalo law review. Vol. 1. No. 1. Hlm. 27.

Peran pendidikan anti korupsi sangat penting sebagai langkah preventif untuk mencegah perilaku koruptif di lingkungan kampus. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk korupsi, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa agar memiliki integritas, kejujuran, dan sikap tanggung jawab yang tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat sehingga mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.

Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang baik. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶ Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membentuk orang yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang mulia, sehingga dapat mengurangi tindakan koruptif yang dapat merugikan negara.

Program ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen civitas akademika. Mahasiswa, dosen, dan staf administrasi harus memiliki kesadaran bersama untuk menolak segala bentuk korupsi. Kampus harus berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kerjasama ini juga dapat diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anti-korupsi di kampus. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan pendidikan, seminar, dan pelatihan untuk mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dari tindakan korupsi serta cara mengidentifikasi dan melaporkan perilaku koruptif di kampus maupun masyarakat.

D. Peran dan Keterlibatan Mahasiswa

Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).⁷ Mahasiswa harus berperilaku anti-koruptif dan tidak melakukan korupsi dalam berbagai tingkatan agar mereka dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Ini berarti siswa harus memahami betapa pentingnya memiliki integritas dalam semua aspek kehidupan, baik akademik maupun non-akademik. Keterlibatan mereka dalam organisasi anti-korupsi, seminar, dan kegiatan lain yang mendukung nilai-nilai kejujuran dan transparansi dapat menjadi langkah nyata dalam mencegah perilaku koruptif di masa mendatang.

Praktik korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk di kampus, seperti plagiarisme, kecurangan dalam tugas, hingga penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Kesadaran kritis terhadap korupsi ini harus terus diperkuat agar mahasiswa dapat menolak segala bentuk kecurangan.

⁶ Sumaryati, Suyadi, Dwi Hastuti. 2019. *Pendidikan antikorupsi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat*. Hlm. 26

⁷ Kemendikbud Republik Indonesia. 2013. *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*. Hlm. 145.

Untuk mendukung peran tersebut, mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bahaya korupsi serta dampak negatifnya terhadap masyarakat. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tetapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif.⁸ Pendidikan anti-korupsi di kampus seharusnya tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga memberikan contoh kehidupan nyata dari kejujuran dan integritas agar siswa dapat memahami konsekuensi nyata dari korupsi dan memahami pentingnya prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi yang mengusung nilai anti-korupsi bisa menjadi sarana untuk memperkuat langkah pencegahan. Organisasi-organisasi ini dapat menyelenggarakan seminar, diskusi, atau kampanye yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pelajar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam mempromosikan budaya anti-korupsi di kampus.

Pembentukan kelompok mahasiswa yang fokus pada isu-isu anti-korupsi di kampus sangat penting. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berbagi pemikiran dan melaksanakan kegiatan yang mendukung transparansi dan kejujuran. Selain itu, mereka bisa berperan sebagai mitra bagi pihak universitas dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan kampus yang berkaitan dengan pencegahan korupsi.

Lebih luas, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan anti-korupsi akan memberi dampak jangka panjang. Dengan membiasakan diri pada budaya yang menolak korupsi, mahasiswa akan membawa nilai-nilai ini ketika mereka terjun ke masyarakat setelah lulus. Mereka akan lebih waspada terhadap tindakan tidak etis dan berani melawan ketidakjujuran, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi di kampus tidak hanya membentuk sikap mahasiswa selama masa studi, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

Dukungan dari pihak universitas, baik dari dosen, staf, maupun administrasi, sangat penting untuk memastikan bahwa gerakan anti-korupsi mahasiswa berjalan dengan baik. Kerjasama antara mahasiswa dan kampus dalam merancang kebijakan yang mendukung nilai-nilai integritas akan memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas. Fakultas dan jurusan juga bisa menjadi sarana untuk menguji kebijakan-kebijakan baru yang mendukung pemberantasan korupsi, misalnya melalui kompetisi debat, penelitian, atau proyek sosial yang berkaitan dengan isu integritas.

Tantangan yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Kehidupan Sehari-Hari Civitas Akademika

Dalam pelaksanaan pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi, ada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan pembelajaran tercapai dan perilaku koruptif dapat ditekan.

⁸ Sofi Nur Azizah, Dedi. 2022. *Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa*. JUSTICES: Journal of Law. Vol. 1. No. 1. Hlm. 49.

Tantangan-tantangan ini berasal dari berbagai sisi, baik internal kampus maupun pengaruh budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap tindakan korupsi.

1. Budaya Korupsi yang Sudah Mengakar

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan pendidikan anti-korupsi adalah budaya korupsi yang telah lama ada di masyarakat, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa yang terbiasa menyaksikan praktik korupsi kecil seperti suap untuk nilai, nepotisme dalam penerimaan mahasiswa, atau penyalahgunaan anggaran kampus, akan menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Pendidikan anti-korupsi sulit memberikan dampak besar jika tidak diiringi dengan perubahan budaya secara menyeluruh di lingkungan akademik.

2. Kurangnya Keteladanan dari Pihak Civitas Akademika

Penerapan pendidikan anti-korupsi di kampus juga terkendala oleh minimnya keteladanan dari dosen, staf, dan pimpinan perguruan tinggi. Mereka seharusnya menjadi contoh penerapan nilai-nilai anti-korupsi. Namun, jika mereka sendiri terlibat dalam tindakan koruptif, maka pesan pendidikan ini akan kehilangan arti di mata mahasiswa. Sangat penting bagi seluruh elemen kampus untuk konsisten menunjukkan komitmen dalam menolak segala bentuk korupsi.

3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan di Kampus

Kampus yang tidak memiliki sistem pengawasan dan penegakan aturan yang memadai juga menyulitkan penerapan nilai-nilai anti-korupsi. Baik mahasiswa maupun dosen bisa mengabaikan prinsip-prinsip anti-korupsi jika tidak ada sanksi yang jelas terhadap tindakan-tindakan yang melanggar etika. Pendidikan anti-korupsi akan lebih efektif jika disertai dengan aturan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas di lingkungan kampus.

4. Kurangnya Kesadaran Mahasiswa tentang Dampak Korupsi

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sering kali belum memahami sepenuhnya dampak negatif korupsi terhadap masa depan mereka. Pendidikan anti-korupsi harus menanamkan pemahaman bahwa korupsi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang merugikan bangsa secara keseluruhan. Tanpa kesadaran mendalam tentang dampak buruk korupsi, mahasiswa cenderung menganggap pendidikan anti-korupsi tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan menyeluruh dalam penerapan pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi. Diperlukan kerjasama antara pengembangan kurikulum, pembentukan budaya anti-korupsi, dan penerapan aturan yang tegas untuk menciptakan kampus yang bebas dari perilaku koruptif. Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan.⁹ Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi diharapkan tidak hanya mengubah pola pikir mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi perilaku harian seluruh civitas akademika. Korupsi terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Oleh karena itu, penguatan integritas pribadi dan kelembagaan

⁹ Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, Amanda Putri Evandra. 2024. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2. No. 2. Hlm. 139.

sangat penting untuk memutus siklus korupsi yang telah berlangsung lama. Terkhusus terkait integritas pribadi Karena, untuk mencegah dan berkembangnya niat dan kesempatan korupsi perlu menumbuhkan nilai integritas pribadi.¹⁰

V. KESIMPULAN

Pendidikan anti-korupsi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan memiliki kesadaran etis dalam menghadapi masalah korupsi yang meresap di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pendidikan. Dengan memasukkan nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab, dan integritas ke dalam pendidikan formal dan non-formal, kampus dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam pencegahan perilaku korup. Mahasiswa, sebagai aktor utama, harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung nilai kejujuran, baik melalui organisasi maupun aktivitas lainnya. Namun, keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan menyeluruh dari pihak kampus, pemerintah, dan penegak hukum untuk membangun budaya yang menolak segala bentuk korupsi. Komitmen yang konsisten dari semua pihak sangat penting agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga tindakan nyata yang memberikan dampak signifikan bagi pembangunan bangsa.

VI. SARAN

Untuk memperkuat pendidikan anti-korupsi di lingkungan kampus, universitas perlu memasukkan materi ini dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib yang tidak hanya membahas teori, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai etika, moral, dan integritas. Modul pembelajaran harus interaktif dan relevan agar mahasiswa dapat memahami pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dosen dan staf kampus juga diharapkan menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip anti-korupsi melalui transparansi dalam pengelolaan kampus. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses untuk mencegah pelanggaran etika. Kampus harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan non-formal seperti seminar dan kampanye anti-korupsi, serta bekerja sama dengan lembaga seperti KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa. Pembentukan kelompok mahasiswa yang fokus pada isu anti-korupsi juga dapat membantu memperkuat gerakan ini di kampus dan mendukung terciptanya kebijakan yang transparan.

¹⁰ Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, M. Tri Warmiyati. 2021. *Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif*. Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, Vol. 2. No. 1. Hlm. 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2015). Model implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi Islam. *KARIMAN: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 1(1), 1–6.
- Aziza, S. N., & Dedi. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54.
- Hasan, Z., Andika, A. P., Mindari, S., Pratama, D. D., & Qunaifi, A. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308–315.
- Hasan, Z., Evandra, A. P., Ghaisani, F. P., Riani, C. J., & Jl, ZA Pagar Alam No. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–150.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo law review*, 1(1), 25-38.
- Kemendikbud, R. I. (2013). *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter anti korupsi melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(2), 51-56.
- Komang, I., & Cahyadi, S. (2022). Pendidikan anti korupsi sebagai strategi dalam pengembangan budaya anti korupsi pada generasi muda di Indonesia. *Civic Education Journal*, 4(2), 259–268.
- Musyarofah, Y. H., Firdaus, K., Siqmi, L., Saputro, L. W. A., & Faradisa, R. D. B. (2024). Tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan anti korupsi di indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(3).
- Sumaryati, S., & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan antikorupsi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat*.
- Tobing, F. (2022). Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 148-158.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (No. 31 Tahun 1999). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (No. 20 Tahun 2001 jo No. 31 Tahun 1999). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.